

PERKEMBANGAN SD INPRES PADA MASA ORDE BARU TAHUN 1973-1983

Oleh
Panji Hidayat
(10406244008)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendiskripsikan latar belakang kebijakan SD Inpres; (2) menjelaskan pelaksanaan kebijakan SD Inpres; (3) menjelaskan dampak kebijakan SD Inpres dari segi kuantitas dan kualitas.

Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis menurut Kuntowijoyo. Sumber data yang digunakan terdiri dari arsip dan dokumen. Tahap penelitian yang pertama adalah pemilihan topik, tahap kedua heuristik atau pengumpulan sumber, penelitian menggunakan sumber primer berupa arsip Instruksi Presiden tentang pembangunan Sekolah Dasar dan koran, tahap ketiga verifikasi atau kritik sumber, tahap keempat interpretasi dan tahap kelima adalah historiografi.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa: (1) awal masa Orde Baru aspek pendukung pendidikan dasar sangatlah kurang, maka sejak lahirnya pemerintah Orde Baru, pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden tentang pembangunan Sekolah Dasar; (2) pembangunan SD Inpres mulai dibangun setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden tahun 1973, kebijakan yang dikeluarkan merupakan kebijakan dua tahun sekali, pemerintah mengeluarkan program-program pendukung kebijakan SD Inpres, diantaranya adalah pembuatan kurikulum pendidikan, sistem pendidikan, penataran dan penempatan guru, penambahan buku-buku pelajaran, penambahan alat-alat peraga untuk menunjang pembelajaran dan pembangunan sarana prasarana lainnya; (3) Kebijakan SD Inpres berdampak pada peningkatan jumlah anak Sekolah Dasar pada tiap tahunnya dan semakin banyak gedung-gedung Sekolah Dasar walaupun pembangunannya belum merata sampai ke pelosok-pelosok desa. Penyelenggaraan pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program wajib belajar, program ini membawa pendidikan yang lebih baik lagi. Tokoh-tokoh pendidikan mendukung program kebijakan SD Inpres, akan tetapi tetap memberikan saran dan kritik agar pemerintah selalu memperbaiki setiap kesalahan yang ada.

Kata Kunci: SD Inpres, Masa Orde Baru, tahun 1973-1983

**THE DEVELOPMENT OF SD INPRES (*INSTRUKSI
PRESIDEN/PRESIDENTIAL DECREE*)/INPRES PRIMARY SCHOOLS IN
THE *ORDE BARU* (NEW ORDER) ERA OF 1973-1983**

**By
Panji Hidayat
Student Number 10406244037**

ABSTRACT

This study aims to describe: (1) the background of SD Inpres Policy; (2) the implementation of SD Inpres Policy; (3) the impacts of SD Inpres Policy in terms of quantity and quality.

This study used Kuntowijoyo's model of historical-critical method. The resources of the data were archives and documents. The steps of this study were: first, topic selecting; second, heuristic or data collecting, where archives of *Instruksi Presiden* (Presidential Decree) on the development of SD and papers were the primary data; third, verification or expert judgement; fourth, interpreting and fifth, historiography.

This study indicated that: (1) in the beginning of *Orde Baru*, there was less adequate support for primary education, and therefore it became one of *Orde Baru*'s focuses, where President Soeharto issued the *Instruksi Presiden*/Presidential Decree on Primary School development; (2) the development of SD Inpres was initiated since the issuing of the Inpres in 1973, where the policy was issued biennially; meanwhile, the Government also issued programs supporting the policy, such as educational curriculum development, educational system, teacher training and placement, extra textbooks and learning props provision and other facilities improvements; (3) SD Inpres policy had impacts on the increasing number of primary students annually and the growing number of primary school buildings, though it did not evenly reach very rural areas. The implementation of education was focused on its expansion, in order to realize the compulsory education program. This program was to improve Indonesian education. Some figures in education supported the SD Inpres policy, but still they gave advice and criticism for the Government to always make improvements.

Keywords: SD Inpres, *Orde Baru* Era, years of 1973-1983

PENDAHULUAN

Sejak lahirnya Pemerintahan Orde Baru, pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam berbagai bidang menuntut pemerintah melaksanakan perbaikan terutama dalam bidang politik dan ekonomi di mana pendidikan memegang peranan yang amat penting. Salah satu misi utama Pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan yang sistematis dan terencana ialah melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pendidikan dasar menjadi salah satu pondasi yang sangat penting bagi manusia, semua aspek pendukung pendidikan harus ada, agar menjadikan negara yang maju di masa yang akan datang. Namun di awal masa orde baru, semua aspek pendukung tersebut sulit terwujud, masih banyak anak-anak usia sekolah (7-12 tahun) yang tidak sempat menikmati pendidikan, betapa banyaknya anak-anak yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya karena berbagai alasan.¹ Alasan ini menjadi masalah serius untuk mencapai tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini menuntut pemerintah untuk melaksanakan berbagai usaha pendidikan bagi seluruh rakyat agar tercapainya tujuan pendidikan yang sudah tercantum dalam Ketetapan MPR.

Soeharto, sebagai pemimpin pemerintahan pada masa itu menuangkan pokok-pokok pikiran beliau tentang pendidikan dalam pidato-pidato yang disampaikan pada berbagai kesempatan. Sebagai mandataris MPR yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan ketetapan-ketetapan MPR maka Presiden Soeharto mengemukakan pandangan-pandangannya tentang pendidikan nasional dalam hubungannya dengan Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena pembangunan nasional merupakan pola utama di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara itu maka salah satu pokok pikiran Presiden Soeharto tentang pendidikan nasional menyangkut masalah hubungan antara pembangunan nasional dengan pendidikan nasional dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang tidak lain merupakan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran Soeharto ini kemudian tercetuslah pemikiran untuk membangun Sekolah-sekolah dasar dan memperbaiki seluruh gedung-gedung sekolah yang sudah rusak. Pada saat itu sering disebut Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres). Seperti Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun 1975/1976 kepada DPR tanggal 6 Januari 1975, yang berbunyi “Salah satu bentuk lain daripada bantuan pengembangan untuk daerah-daerah adalah Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar. Program ini bertujuan untuk memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan.”

¹ Depdikbud RI. Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembangunan. Jakarta: Depdikbud RI, 1977, hlm. 13

Ketentuan tentang SD Inpres ini telah tercantum dalam Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD². Sejak tahun 1974, setiap tahunnya dilakukan pembangunan dan perbaikan ribuan gedung-gedung SD yang berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui Perkembangan SD Inpres (Instruksi Presiden) pada Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1973-1983.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis menurut teori Kuntowijoyo. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan.³

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode historis. Alasan menggunakan metode ini didasarkan atas bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian sejarah, khususnya sejarah pendidikan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian sejarah ini memiliki 5 tahap utama, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi).

PEMBAHASAN

Pendidikan yang baik, diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berguna bagi masyarakat dan negaranya. Untuk menciptakan pendidikan yang baik, perlu adanya suatu sistem yang mengatur jalannya pendidikan yang berlangsung di masyarakat. Dengan sistem yang berlaku, jalannya pendidikan akan lebih jelas arahnya sesuai dengan cita-cita negara.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.⁴ Apapun nama sistem yang berlaku, yang terpenting adalah bagaimana caranya tujuan pendidikan yang sudah dicanangkan dapat terwujud, pastinya dengan dukungan penuh dari berbagai elemen yang terlibat.

Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 sudah diatur dengan jelas dasar-dasar dan tujuan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta tanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

² G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin. *Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978*. Jakarta. PT. Citra Kharisma Bunda.2003, hlm. 122-123

³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 1995, hlm. 90.

⁴ Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Educational Management, Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm, 79.

Maksud dari tujuan ini adalah pendidikan di sekolah bukan hanya menjadikan manusia yang cakap tetapi manusia susila yang cakap dan diharapkan sekolah-sekolah menghasilkan terbentuknya warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.⁵

Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lancarnya pendidikan, antara lain kurikulum, tenaga pengajar, sarana, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 yang berlaku sampai dengan 1989, pemerintah harus melaksanakan sistem pendidikan sesuai dengan isi-isi di dalam Undang-Undang. Tahun 1954-1989 Negara Republik Indonesia mengalami 2 periode kepemimpinan, yaitu Ir. Soekarno pada masa orde lama, dan Soeharto pada masa orde baru. Artinya sistem pendidikan yang telah dicanangkan pada masa orde lama harus dilanjutkan pada masa orde baru. Karena pendidikan di Indonesia dituntut untuk semakin baik dari tahun ketahun, maka seluruh elemen mulai dari pemerintah dan masyarakat harus turun untuk ikut membangun pendidikan, dan hal ini menjadi tugas yang harus dipikirkan pada masa pemerintahan Soeharto.

Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah soal fasilitas pendidikan yang memadahi, fasilitas tersebut sebagai penunjang dalam menjalankan sistem pendidikan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Grafik perkembangan jumlah murid SD tahun 1900-1970 memperlihatkan setiap tahunnya selalu naik, bahkan kenaikannya meningkat tajam.⁶ Tahun 1951 jumlah murid tercatat sebanyak 10.962.000 murid SD.⁷ Kenaikan ini memperlihatkan adanya minat bersekolah yang tinggi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Kenaikan ini sangat menggembirakan bagi pemerintah, disisi lain menimbulkan permasalahan yang cukup besar, yaitu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadahi. Penyediaan fasilitas ini menunjang mutu pendidikan yang lebih baik. Fasilitas-fasilitas untuk menunjang pendidikan tersebut diantaranya :

1. Gedung dan kelas
2. Alat pelajaran
3. Buku Pelajaran

⁵ Prof Dr. H.A.R Tilaar MSc. Ed. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 135.

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*. Balai Pustaka, 1976, hlm. 53.

⁷ Depdikbud. *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman*. Balai Pustaka, 1986, Hlm. 188.

Secara garis besar, langkah utama untuk mencapai perluasan daya tampung dan peningkatan mutu SD adalah pengadaan gedung-gedung SD baru yang dimulai pada pelita II. Diantaranya adalah pengangkatan dan penempatan guru-guru untuk sekolah-sekolah Dasar, peningkatan kegiatan pembinaan, pengadaan buku-buku pelajaran pokok, buku bacaan alat-alat pelajaran lainnya, tempat bacaan, perpustakaan sekolah.⁸ Keempat hal ini menjadi pokok utama dalam kemajuan pendidikan.

Perluasan kesempatan belajar di SD dilaksanakan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan. Bantuan dari pemerintah keluar secara bertahap. Kebijakan yang dikeluarkan merupakan kebijakan 2 tahun sekali, awal mula Inpres keluar pada tahun 1973, nantinya di Inpres Tahun 1974, merupakan kelanjutan dari Inpres 1973, dan berlaku pada inpres ditahun-tahun selanjutnya. Agar program yang sudah berjalan dapat diselesaikan terlebih dahulu.

Tahap pertama pada tahun 1973, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 1973 tentang program bantuan pembangunan Sekolah Dasar. Tahap pertama pembangunan SD Inpres di tahun 1973 ini disediakan bantuan tahap pertama untuk pembangunan 6.000 gedung Sekolah Dasar. Masing-masing Sekolah Dasar terdiri dari 3 ruangan kelas, 1 ruangan guru, kamar kecil dan perabot sekolah. Dalam tahap-tahap selanjutnya disediakan bantuan untuk tiap kali satu unit yang terdiri atas 3 ruangan kelas, kamar kecil dan perabot sekolah.⁹

Tahap kedua, pemerintah menyelesaikan gedung-gedung sekolah yang belum selesai di tahap pertama. Jumlah dan rinciannya sama dengan tahap pertama yaitu 6.000 gedung sekolah dasar. Masing-masing gedung terdiri dari 3 ruangan kelas yang dapat digunakan, kamar kecil, dan perabot sekolah.¹⁰ Tahap kedua ini dilengkapi dengan penyediaan guru, perabot sekolah dan buk-buku pelajaran pokok, disamping penyediaan buku bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan Sekolah Dasar yang sudah ada.

Tahap selanjutnya yaitu melalui Inpres No 6 tahun 1975 pada tanggal 10 April 1975. Pada tahap ini terdapat penambahan bantuan, diantaranya adalah dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih, penyediaan guru, buku-buku pelajaran pokok dan penataran guru, dan buku bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan, serta dimulainya rehabilitasi sebagian dari jumlah Sekolah Dasar yang ada. Jumlah pembangunan gedung sekolah pada Inpres tahap ketiga ini juga ditambah menjadi 10.000 gedung Sekolah Dasar.

Hasil pertama dari usaha peningkatan mutu pendidikan dasar adalah penyediaan 179 juta buku yang terlebih dahulu dinilai oleh tim penilai yang dibentuk oleh pemerintah, tim penilai ini terdiri atas para ahli pendidikan, ahli bahasa dan ilmu jiwa

⁸ Prof. Dr. H.A.R Tilaar, M.Sc.Ed, Lima Puluh Tahun Pendidikan Nasional 1945-1995, Jakarta:Gramedia, 1995, hlm. 148.

⁹ *Ibid*, hlm, 2

¹⁰ Arsip Nasional Indonesia tentang *Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974.

anak-anak. Pemerintah kemudian menyediakan perpustakaan di setiap-setiap sekolah yang akan dibangun. Setelah adanya bangunan SD Inpres yang baru, pemerintah juga mengeluarkan keputusan-keputusan untuk mengatur berjalannya proses belajar mengajar di sekolah.

Masa Pelita II mulai diadakannya kurikulum pendidikan yang baru, yaitu kurikulum 1975, dimana Kurikulum tersebut terdiri dari 7 unsur pokok yang termuat dalam 3 buku: (a) Dasar, tujuan dan prinsip-prinsip, (b) struktur program kurikulum, (c) garis-garis besar program pengajaran, (d) sistem penyajian, (e) sistem penilaian, (f) sistem bimbingan dan penyuluhan, (g) pedoman supervisi dan administrasi.¹¹ Unsur pokok tersebut nantinya akan menjadi pokok utama dalam pembagian kurikulum SD 1975.

Untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1979 pada tanggal 4 Juni 1979. Adapun isinya adalah pembangunan gedung sekolah dasar termasuk penambahan ruang kelas baru, perabot sekolah, fasilitas penyediaan air bersih dan rumah dinas penjaga sekolah, dilengkapi dengan penyediaan guru. Pada kebijakan kali ini pemerintah juga menyediakan pembangunan rumah dinas kepala sekolah di daerah terpencil. Tahun pertama Repelita III (1979/1980) jumlah murid pendidikan dasar telah mencapai 24,124 Juta.

Keberhasilan pelaksanaan sistem pendidikan nasional sebagian tergantung kepada tenaga-tenaga kependidikan sebagai pelaksana, baik guru sebagai pelaksana langsung kurikulum maupun tenaga kependidikan lainnya. Kualitas memang lebih penting dari pada kuantitas, ternyata kualitas guru juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan guru itu sendiri, walaupun kuantitas juga menjadi masalah yang tidak kalah penting. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru adalah dengan cara kenaikan pangkat.

Berbagai permasalahan tersebut, dari pemerintah sudah mengupayakan untuk menyelesaikan. Usahnya adalah setiap daerah atau wilayah mampu menghasilkan guru SD sesuai dengan kebutuhan yang ada dan perkembangannya. Peningkatan aspek pemerataan dikaitkan dengan perluasan kesempatan belajar dan Rangkaian kebijaksanaan pokok tersebut, titik berat penyelenggaraan pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program wajib belajar.¹²

Kebijakan yang diterapkan disetiap masa pasti ada perbedaan dengan masa sebelumnya, dan setiap kebijakan tentu mempunyai sisi baik maupun buruk. Kebijakan yang ada juga selalu diperhatikan kualitas dan kuantitasnya untuk menyempurnakan sistem pendidikan yang telah ada. Tujuannya agar pendidikan bisa semakin baik dengan

¹¹ Lihat Kurikulum Sekolah Dasar 1975, Buku I s.d. III (25 Jilid), Jakarta: Dep. P dan K, 1978.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. *40 Tahun Indonesia Merdeka*. hlm. 1460

kebijakan yang tepat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya pada masa orde baru dalam hal pendidikan, salah satunya adalah kebijakan SD Inpres.

Masa orde baru disebut juga era pembangunan, karena pada masa ini pembangunan diberbagai bidang berkembang cepat, namun pembangunan tersebut hanya mengedepankan pembangunan fisik, tak terkecuali dalam bidang pendidikan yang hanya terpusat pada pembangunan gedung-gedung sekolah, namun tenaga pendidik tidak terlalu diperhatikan.

Meningkatnya fasilitas pendidikan seperti jumlah kelas yang dari tahun ke tahun selalu bertambah, maka jumlah murid yang ada juga semakin banyak, pada tahun 1981-1983 beberapa Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan jumlah murid. Semakin banyaknya jumlah murid yang ada, harapannya angka putus sekolah semakin menurun, tentunya dengan di imbangi dengan kualitas dan kuantitas guru yang ada. Menurut data yang ada menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pengajar secara kualitas menurut ijazah belum bisa dikatakan profesional. Jumlah guru yang sudah sarjana masih belum banyak.

KESIMPULAN

SD Inpres adalah kebijakan pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Cita-cita tersebut salah satunya adalah program Wajib Belajar, Program tersebut mewajibkan setiap anak yang berumur 8 tahun memperoleh pendidikan dasar, seiring berjalannya waktu pemerintah banyak mengalami kendala, terutama adalah sistem dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai untuk menampung jumlah siswa yang ada, Faktor-faktor inilah yang menjadi bahan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan pendidikan dalam program pembangunan nasional.

Pembangunan SD Inpres dimulai setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 1973 tentang pembangunan Sekolah Dasar pada Pelita II, Bantuan dari pemerintah keluar secara bertahap. Penyelenggaraan pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program wajib belajar. Dampak kebijakan SD Inpres dari sisi kuantitas cenderung mengalami peningkatan, dilihat dari pembangunan gedung Sekolah Dasar yang semakin banyak, jumlah murid semakin bertambah dan dari sisi kualitas cenderung kurang maksimal, dilihat dari tenaga pengajar yang rata-rata masih lulusan SMA dan belum berpengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud RI.(1977). *Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembangunan*: Jakarta
Dwipayana G & Nazarudin Samsuddin. (2003). *Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978*. Jakarta. PT. Citra Kharisma Bunda.
Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng
Veithzal Rivai dan Sylviana Murni. (2009). *Educational Management, Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.

Tilaar, H.A.R. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. (1976). *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*. Balai Pustaka, 1976
Departemen pendidikan dan kebudayaan. (1986). *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka,
Sekretariat Negara Republik Indonesia. *40 Tahun Indonesia Merdeka*. hlm. 1460

SUMBER ARSIP

Inpres No 6 Tahun 1974 “Program Bantuan Sekolah Dasar”

Reviewer

Zulkarnain, M.Pd.
NIP. 19740809 200812 1 001

Yogyakarta 21 Juli 2016
Pembimbing

Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.
NIP. 19770618 200312 2 001